

338.91
UPH
a 61



No. Urut:	131/K/1004
Tgl.:	15-10-1996

LAPORAN HASIL PENELITIAN

**ANALISIS SOSIAL EKONOMI KELOMPOK MASYARAKAT
PENERIMA INPRES DESA TERTINGGAL (IDT)
DI WILAYAH PANTAI UTARA JAWA**

(Studi Kasus di Kabupaten Pekalongan, Demak dan Pati)

OLEH :
DRS. AD UPHADI, MS., DKK.

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
1996

Dibiayai oleh DIP Bagian Proyek Operasi dan Perawatan Fasilitas
Universitas Diponegoro, Nomor 097/XXIII/3/-/1995 Tanggal 28 Maret 1995
Berdasarkan Surat Perjanjian Tugas Pelaksanaan Penelitian
Para Tenaga Pengajar Universitas Diponegoro
Nomor 120 C/PT09.OP/B/1995, Tanggal 1 September 1995

DAFTAR ISI

	Halaman.
I. Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Penelitian	8
II. Metodologi	10
2.1. Metoda Pengambilan Sampel	10
2.2. Metoda Analisa	10
III. Hasil Analisa	12
3.1. Gambaran Umum Jawa Tengah	12
3.2. Gambaran Umum Daerah Penelitian	21
3.3. Analisis Sosial Ekonomi	27
IV. Penutup	30
Lampiran-lampiran: Monografi dan Peta Desa Sampel	

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel.3.1. Jumlah Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan	12
Tabel.3.2. Tingkat Pertumbuhan Penduduk di Jawa Tengah	14
Tabel.3.3. Perbandingan Pertumbuhan Penduduk antara Jateng dan beberapa propinsi lain	14
Tabel.3.4. Persentase Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk tahun 1990	15
Tabel.3.5. Pertumbuhan Penduduk Desa-Kota tahun 1980-1990	15
Tabel.3.6. Desa Miskin di Jawa tengah	17
Tabel.3.7. Persentase Desa Miskin tiap Dati II se Jawa tengah	19

KATA PENGANTAR

Akhirnya penulisan penelitian berjudul : Analisis Sosial Ekonomi Kelompok Masyarakat Penerima Inpres Desa Tertinggal (IDT) di Wilayah Pantai Utara Jawa (Studi Kasus di Kabupaten Pekalongan, Demak dan Pati) dapat dituntaskan sesuai dengan waktu yang dibutuhkan.

Banyak pihak telah membantu penyelesaian penelitian ini. Untuk itu dalam kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Rektor UNDIP.
2. Bapak Ketua Lemlit UNDIP.
3. Bapak Dekan fak. Ekonomi UNDIP.
4. Bapak-bapak dari instansi Kantor Statistik Kabupaten Demak, Pati dan Pekalongan.
5. Bapak-ibu perangkat desa sampel yang berada di daerah Pati, Demak dan Pekalongan.

Sekiranya masih terdapat kekurangan maupun kesalahan, maka hal itu sepenuhnya tanggung jawab penulis.

Semarang, 10/2/1996

Peneliti.

RINGKASAN

Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) sebagai program pengentasan kemiskinan masih memerlukan waktu yang relatif panjang untuk mengevaluasi sejauh mana program tersebut telah mencapai sasaran dan tujuan yang dikehendaki.

Namun, secara umum para penerima IDT merasa sangat bersyukur dengan adanya program IDT ini, karena program ini tidak sekedar memberi bantuan, namun ada kehendak kuat dari program ini, bahwa sdana yang telah diberikan harus dikembangkan pada usaha-usaha produktif.

Selain itu, program IDT merupakan program yang telah mendukung rakyat kecil sebagai orang yang diberi kepercayaan untuk mengelola dana. Kepercayaan, bagi rakyat kecil merupakan satu tugas yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dan tampaknya, banyak penerima IDT telah dengan kesadaran penuh melakukan tanggung jawab itu, meskipun pada awalnya masih ada keraguan ataupun ketakutan akan menemui kegagalan. Namun, berkat bimbingan para pendamping di tingkat desa, serta monitoring yang terus menerus dilakukan oleh perangkat desa dan kecamatan, maka kemungkinan dana itu 'meleset' semakin kecil.

Ternak merupakan kegiatan yang sebagian besar dilakukan penerima IDT. Alasan klasiknya adalah, berternak bagi para petani adalah suatu pekerjaan yang sudah turun temurun, dan dapat dikerjakan oleh seluruh anggota keluarga.

Perlu dilakukan upaya program yang lebih komprehesif untuk segera dapat menuntaskan kemiskinan di desa-desa.

Pembinaan, berupa pemberian informasi yang tepat dengan kegiatan dana IDT, serta penyuluhan yang sifatnya dapat membuka cakrawala dan wawasan baru bagi petani adalah upaya-upaya yang harus terus menerus dilakukan dan bersifat antar sektoral.

SUMMARY

Inpres Desa Tertinggal (IDT) program is one of some government policies to get poor farmer to high level, high welfare.

IDT has been done for 2 years ago, so it is not fairly to evaluate this program. But, for knowledge, it is important to identify, to find restriction and give some solutions for goodness this program.

The main findings this studies, are :

1. IDT is credible fund for poor farmer, so they have to operate IDT' fund on economic activity or on productivity activity.
2. More than 80%, fund of IDT have been bought animals, and 20% for activity on small trade in local area.
3. Level of education, natural, old are significant to this program.
4. Monitoring which has been by Kelurahan and Kecamatan significant to incentive their activities.

IDT program is ought to integrated with another rural program.

**ANALISIS SOSIAL EKONOMI KELOMPOK MASYARAKAT
PENERIMA INPRES DESA TERTINGGAL (IDT)
DI WILAYAH PANTAI UTARA JAWA
(STUDI KASUS DI KABUPATEN PEKALONGAN, DEMAK DAN PATI)**

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Tekad pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di pedesaan mendapat tahapan yang positif dari berbagai pihak dan profesi. Tekad tersebut tampaknya sudah dimulai, dengan telah dibentuknya asisten Menteri Bappenas bidang pengentasan kemiskinan, bahkan didukung Keppres yang isinya pada upaya pengentasan kemiskinan.

Masalah kemiskinan di Indonesia bukan masalah yang baru. Pada jaman kolonial, khususnya pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, keprihatinan terhadap luasnya kemiskinan di Jawa telah mendorong pemikiran-pemikiran dan sasaran-sasaran kebijaksanaan dan cara-cara untuk mengatasinya. Segera sesudah dimulainya pembangunan lima tahun (PELITA) I tahun 1969, orang mulai berdebat tentang bagaimana sebaiknya memberikan prioritas dalam pembangunan nasional, apakah dengan cara melaksanakan program-program untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat lebih dahulu, atau dengan segera melenyapkan kemiskinan yang diderita oleh sebagian besar rakyat, terutama didaerah

pedesaan (Mubyarto, 1987).

Meskipun angka kemiskinan di Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan tendensi yang menurun, akan tetapi pada tahun 1987 ditaksir masih ada sekitar 30 juta orang atau kira-kira 17% dari seluruh penduduk Indonesia, hidup dibawah garis kemiskinan (Pidato Kenegaraan Presiden RI tanggal 16 Agustus 1989). Hal ini jelas masih mengganggu pikiran kita mengingat kita telah melaksanakan pembangunan lima tahun (PELITA) selama 25 tahun terakhir ini. Sementara tujuan pembangunan nasional tidak lain adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu kesejahteraan lahir dan batin.

Sebetulnya dalam beberapa tahun terakhir ini, berbagai kebijaksanaan, program dan proyek, telah dilakukan oleh pemerintah dalam kaitan mengatasi masalah kemiskinan, khususnya kemiskinan pedesaan. Akan tetapi proyek-proyek pertanian atau pedesaan yang telah diadakan oleh pemerintah dalam upaya tersebut, sesungguhnya sebagian hasilnya telah dirasakan, namun toh hasil-hasil ini belum sepenuhnya dapat dirasakan oleh sebagian besar warga yang miskin tersebut.

Memang, upaya untuk memerangi kemiskinan (pedesaan) di Indonesia bukannya tidak ada, akan tetapi selalu saja ada hambatan-hambatan, di samping karena faktor ekonomi tentunya, yang dapat merintangangi ke arah keberhasilan upaya tersebut.

Hambatan atau kendala tersebut misalnya dapat berupa apa yang biasanya disebut sebagai fakto-faktor kelembagaan. Dalam hal ini, di satu pihak penentu kebijaksanaan biasanya sudah mampu menangkap beberapa aspirasi atau keinginan masyarakat terlemah di pedesaan, sehingga secara tepat aspirasi-aspirasi berhasil dimasukkan ke dalam program-program pembangunan nasional. Namun, pada saat kebijaksanaan dan program-program tersebut hendak dilaksanakan, ternyata ada pihak-pihak yang terlebih dahulu dan lebih mampu 'memanfaatkan' program-program tersebut. Ini berarti bahwa program-program tersebut ada, tetapi manfaatnya tidak sampai pada sasaran yang telah ditentukan (Mubyarto, 1984).

Masalah kemiskinan, ternyata sangat luas dan kompleks. Definisi atau pengukuran, sebab-sebab dan akibat kemiskinan, juga sangat banyak dan luas sekali. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bahwa masalah tersebut (di Indonesia) baru dibahas secara sungguh-sungguh setelah pelita berjalan beberapa kali, meskipun masalah kemiskinan itu sendiri telah dikenal dan diselidiki oleh pemerintah kolonial sejak awal abad ini. disamping itu, masih kurangnya pengetahuan dan tingkat pemahaman kita tentang seluk beluk kemiskinan, juga mengakibatkan masalah tersebut baru dibahas secara serius baru dibahas secara serius dan sistematis jauh setelah itu.

Sehubungan dengan itulah, maka sudah sepantasnya kalau seluruh lapisan masyarakat, baik itu pejabat pemerintah, para politisi, para pakar sosial maupun masyarakat itu sendiri,

memikirkan dan berupaya sungguh-sungguh bagaimana memerangi kemiskinan itu. Sebab kalau tidak demikian, tidak mustahil kemiskinan akan menimbulkan berbagai masalah soaial politik yang gawat dalam masyarakat. Gangguan-gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) atau bahkan gangguan dan kerawanan di bidang politikpun, yang pada gilirannya akan mengganggu stabilitas dan perlemah ketahanan nasional, adalah akibat dari pada kemiskinan yang diderita oleh masyarakat.

Sebagai akibat yang ditimbulkannya, maka sebab-sebab kemiskinanpun bermacam-macam, atau bahkan sangat kompleks. Sebab-sebab terjadinya kemiskinan itu, dapat berasal dari faktor-faktor manusianya sendiri, karena keadaan alam yangtidak menguntungkan (daerahnya tandus, tidak subur, terisolir) atau bisa juga berasal dari keduanya, yaitu faktor manusia-alam.

Memang, faktor manusia atau penduduk memegang peranan yang sangat besar dalam kaitan besarnya kemiskinan pedesaan di Indonesia, Khususnya di Jawa. Prof. Byarto juga mengatakan demikian. Dikatakannya, bahwa besarnya jumlah penduduk pedesaan yang tidak memiliki tanah, terutama tanah sawah, yaitu yang terdiri dari kaum buruh tani dan petani-petani kecil atau petani guren itu, adalah suatu masalah struktural penyebab kemiskinan di Indonesia. Perlu diketahui, bahwa kedua kelompok 'petani'tersebut mencakup sepertiga jumlah seluruh penduduk Indonesia yang tingkat hidupnya masih jauh dibawah kebutuhan fisik minimum (Mubyarto, 1987).

Berbagai aspek yang menyangkut kehidupan masyarakat kita di daerah pedesaan dapat disebutkan, misalnya : tingkat kelahiran yang relatif tinggi (dan disertai angka kematian balita yang relatif tinggi pula), struktur umur yang tidak menguntungkan (artinya proporsi golongan penduduk yang berusia muda-non produktif lebih besar dibanding mereka yang berusia produktif dari segi ekonomi), jumlah angkatan kerja yang banyak (tetapi kualitasnya rendah), masih banyak yang buta huruf atau pendidikan yang rendah, kebiasaan kawin muda, adat (tradisi) yang kaku dan sebagainya.

Hingga kini kita semua tahu, bahwa sebagian besar penduduk masih bekerja atau menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian, suatu sektor yang sangat erat kaitannya dengan sektor pedesaan. Sebagian besar mereka juga tinggal di daerah pedesaan . Dari berbagai data diketahui, bahwa sekitar 60 persen penduduk Indonesia bekerja pada sektor pertanian dan sekitar 80% dari seluruh jumlah penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan.

Struktur kependudukan dan struktur perekonomian seperti digambarkan diatas mengandung satu konsekuensi bagi pemerintah bahwa titik berat pembangunan seharusnya diarahkan ke masyarakat pedesaan (Hadi Prayitno, 1986). Konsekuensi demikian ini telah lama disadari oleh pemerintah, dan sejak beberapa tahun terakhir, pembangunan pertanian dan pembangunan pedesaan semakin mendapat perhatian. Sementara berbagai kebijaksanaan yang kini dijalankan

menunjukkan ke arah itu.

Hendaknya diketahui bahwa pembangunan pedesaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional, yaitu upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, materiil dan spiritual, yang mencakup seluruh lapisan rakyat pedesaan (Mubyarto dan Eddy Suandi Hamid, 1986).

Tidaklah salah kalau kita mengatakan bahwa pada hakekatnya pembangunan pertanian dan pembangunan pedesaan adalah upaya pemerintah untuk memperkecil (kalau bisa melenyapkan sama sekali) jumlah penduduk miskin di Indonesia. Upaya demikian itu telah menjadi komitmen politik, baik sebagai ketetapan MPR atau pernyataan pimpinan eksekutif. Masalahnya adalah bagaimana membuat proyek-proyek atau program-program yang secara langsung dapat mengangkat mereka dari garis kemiskinan. Hal ini merupakan tantangan besar (TA Salim, 1979).

Dalam era pembangunan dua puluh lima tahun, yang dibagi-bagi menjadi lima tahapan Pelita, Indonesia menempatkan pembangunan pertaniannya sebagai prioritas pertama. Pembangunan pertanian khususnya dan pembangunan ekonomi pada umumnya, terbukti telah menunjukkan hasil-hasil yang positif disamping tentu saja ada dampak negatifnya. Tetapi diakui atau tidak hasil kemajuan pembangunan tersebut belum dapat dinikmati secara merata oleh penduduk, terlebih-lebih golongan miskin.

Barangkali benarlah kalau kita mengatakan, bahwa banyak diantara program-program pemerintah untuk pembangunan wilayah pedesaan, dalam rangka mengurangi kemiskinan, selama ini hanya menguntungkan sekelompok kecil lapisan atas masyarakat pedesaan. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah, seperti pengenalan teknologi baru dan fasilitas kredit murah untuk untuk meningkatkan pendapatan dan kemakmuran penduduk miskin (yang pada umumnya terdiri dari petani kecil) ternyata hanya dapat dimanfaatkan oleh petani-petani kaya yang memiliki lahan yang luas (Jacob Ampang, 1984).

Jelaslah bahwa upaya untuk mengurangi atau menanggulangi kemiskinan (pedesaan) di Indonesia, tidak mudah. Faktor-faktor kelembagaan, fisik lokasional, ekonomi politik serta karena faktor struktural dan faktor dana tertentu, adalah kendala-kendala utama yang merintang program penanggulangan kemiskinan pedesaan Indonesia.

Di dalam membicarakan kemiskinan terdapat berbagai tolok ukur untuk menentukan 'siapa yang termasuk golongan miskin'. Meskipun para pakar sosial belum sepenuhnya sepakat pada satu metoda pengukuran tetapi tolok ukur yang betul-betul jelas untuk mengungkap masalah kemiskinan, sangat diperlukan. Terlebih-lebih para pakar ekonomi.

Pengertian kemiskinan, tidaklah cukup hanya diartikan sebagai kebalikan daripada pengertian kekayaan. Gejala disuatu masyarakat harus dapat diukur dengan suatu ukur yang jelas :

sampai batas mana seseorang dapat disebut kaya.

Atas dasar latar belakang tersebut, maka kiranya perlu dilakukan suatu penelitian yang dapat melakukan evaluasi aras program pengentasan kemiskinan. Oleh karenanya, tepat bila dilakukan penelitian dengan mengambil daerah sampel di daerah atau wilayah pantai utara Jawa (sesuai dengan pengembangan ilmiah pokok Universitas Diponegoro, yang menitikberatkan pada wilayah pantai).

Rencana penelitian mengambil judul : **ANALISIS SOSIAL EKONOMI KELOMPOK MASYARAKAT PENERIMA INPRES DESA TERTINGGAL (IDT) DI WILAYAH PANTAI UTARA JAWA (STUDI KASUS DI KABUPATEN PEKALONGAN, DEMAK DAN PATI)**

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memperoleh gambaran yang sesungguhnya mengenai kondisi sebelum dan sesudah adanya program IDT di desa-desa yang diambil sebagai lokasi penelitian.
2. Menelusuri lebih jauh faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan dalam kaitannya dengan pelaksanaan program IDT di desa-desa yang diambil sebagai lokasi penelitian.

Adapun kontribusi yang ingin disumbangkan dari penelitian

ini adalah :

1. Mencoba memberikan sumbangkan pemikiran yang menyangkut pemecahan masalah kemiskinan di daerah pedesaan dalam konteks pembangunan pertanian pedesaan, khususnya dalam kaitannya dengan pelaksanaan program IDT untuk waktu-waktu yang akan datang.

2. Sebagai bahan informasi dalam menentukan dan memperbaiki srategi kebijaksanaan dalam upaya memerangi kemiskinan di daerah pedesaan.

3. Sebagai landasan atau bahan informasi bagi penelitian lanjutan yang lebih dalam dan luas yang serupa di daerah lain.